

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah mengalami perubahan yang signifikan dengan diberlakukannya otonomi daerah. Berdasarkan Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 yang sudah direvisi menjadi Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang memisahkan fungsi eksekutif dan fungsi legislatif. Dan Undang – Undang No. 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang – Undang No. 33 tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan arti penting bagi sistem pemerintah pusat dan daerah yang mendorong adanya desentralisasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pemberlakuan Undang – Undang No. 32 dan No. 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan dan keleluasaan yang lebih luas bagi pemerintah kabupaten dan kota sebagai pelaksana dan promotor pembangunan di daerah untuk mengatur dan menentukan sendiri kegiatan pembangunan wilayah yang sesuai prioritas kebutuhan masyarakat setempat. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah daerah dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif atau sering disebut *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 pendanaan kewenangan yang diserahkan dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan pusat – daerah dan antara daerah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba usaha daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Menurut Halim dalam Malau (2014), permasalahan yang sering dihadapi daerah umumnya berkaitan dengan penggalian sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD yang masih belum memberikan

kontribusi yang maksimal terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah, dapat mengakibatkan kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Pendistribusian pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pembangunan, oleh pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat disebabkan karena setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional daerahnya masing – masing. Hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk menghindari ketimpangan fiskal ini, pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk setiap daerah. Kebijakan penggunaan semua dana perimbangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk digunakan secara efektif dan efisien.

Menurut Tambunan (2001), investasi merupakan merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi, atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya menciptakan atau meningkatkan permintaan pasar. Penjelasan di atas menyatakan tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh investasi. Munculnya investasi akan mendorong kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan menambah tabungan masyarakat dan begitu juga sebaliknya. Peningkatan tabungan masyarakat akan mendorong peningkatan investasi disebabkan oleh bunga bank yang cukup rendah sehingga dampaknya banyak pengusaha menginvestasikan modalnya ke sektor ekonomi.

Permasalahan yang serius juga dialami oleh negara Indonesia saat ini adalah masalah pengangguran. Menurut Depnakertrans (2004), pengangguran

merupakan masalah ketenagakerjaan yang saat ini sudah mencapai kondisi yang memprihatinkan. Jumlah penganggur dan setengah penganggur mengalami peningkatan. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakkan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadikan beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dan dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan jangka panjang. Maka tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi ini. Semakin besar tenaga kerja produktif di suatu daerah maka output yang dihasilkan juga semakin besar. Hal ini juga memacu pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. Sehingga peneliti menimbulkan minat untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Berimbang, Investasi, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara 2015-2018.**

I.2 Teori Pengaruh

I.2.1 Teori Pengaruh PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Penelitian Saragih, (2003 : 56) Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi positif memiliki kemungkinan kenaikan PAD atau dengan peningkatan akses dari pertumbuhan ekonomi atau PDRB dan diantara pertumbuhan ekonomi dan PAD diyakini terdapat adanya korelasi.

Menurut hasil penelitian Maryati (2010) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus berdampak pada perekonomian daerah.

Menurut penelitian Tambunan (2006) Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah itu tersebut.

I.2.2 Teori Pengaruh Dana Berimbang Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Penelitian Nasution (2015) Dana Berimbang merupakan sumber pendapatan yang berasal dari anggaran yang bertujuan pemberian otonomi kepada daerah dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang baik.

Menurut Penelitian Badrudin (2016) dengan DAK, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan belanja modal, karena cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

I.2.3 Teori Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Teori Penelitian Erlina (2015: 223) Investasi merupakan kegiatan pemerintah menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang seperti bunga, deviden dan royalti yang dapat meningkatkan kemampuan pemerintah terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Menurut penelitian Sitompul (2007) Pertumbuhan ekonomi daerah didorong oleh investasi yang berpengaruh secara signifikan, hal ini berarti bahwa investasi yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Menurut penelitian Sukirno (2008:122) Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman–penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang–barang modal dan perlengkapan–perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Menurut kuncoro (2010:137) Besarnya nilai investasi mampu menggerakkan perekonomian

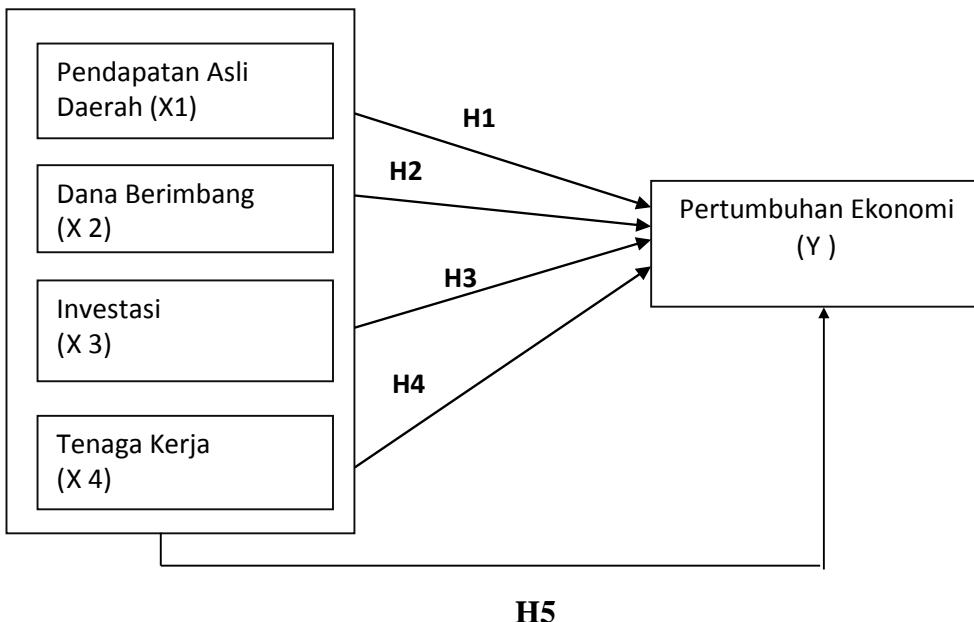
I.2.4 Teori Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Penelitian Lewis (2009) Tenaga kerja yang homogen dianggap bisa bergerak dan berahli dari sektor tradisional ke sektor modern. Meningkatnya permintaan tenaga kerja dari sektor tradisional yang bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Menurut Penelitian Umar (2010) Tingginya tingkat upaya mengakibatkan kecilnya penyerapan tenaga kerja oleh industri yang terkait agar mengifiensikan dalam hal biaya. Hal tersebut mengartikan kenaikan tingkat upah mengakibatkan menurunnya penyerapan tenaga kerja dalam suatu industri.

Menurut penelitian Sukirno (2008:430) Meningkatnya jumlah tenaga kerja akan memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksinya barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

I.5 Kerangka Konseptual



Gambar I.5

I.6 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori serta penelitian terdahulu, maka peneliti mengajukan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara bagaimana pengaruh empat variabel bebas terhadap suatu variabel terikat dalam penulisan hipotesis penelitian ini sebagai berikut.

- H1 : PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sumatera utara 2015-2018.
- H2 : Dana berimbang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sumatera utara 2015-2018.
- H3 : Investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sumatera utara 2015-2018.
- H4 : Tenaga Kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sumatera utara 2015-2018.
- H5 : PAD, Dana berimbang, investasi, dan Tenaga Kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sumatera utara 2015-2018.